

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH

---

# Rencana Tindak Pengendalian Strategis Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2022

Penetapan Nomor : 050 / 06507 / 2022



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**DINAS PEKERJAAN UMUM**

## DAFTAR ISI

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP).....	1
DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS.....	1
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Dasar Hukum .....	1
C. Maksud dan Tujuan.....	2
D. Ruang Lingkup.....	3
II. SEKILAS TENTANG SPIP .....	4
A. Pengertian .....	4
B. Tujuan SPIP .....	4
C. Unsur-unsur SPIP .....	4
D. Pernyataan Tanggung Jawab ( <i>Statement of Responsibilities</i> ) .....	7
III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN .....	8
A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik .....	8
B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini .....	8
C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian .....	9
IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN.....	11
A. Pernyataan Tujuan.....	11
B. Risiko-risiko .....	11
C. Kegiatan Pengendalian Terpasang.....	12
D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan .....	12
V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI .....	14
VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI.....	15
A. Pemantauan Berkelanjutan .....	15
B. Evaluasi Terpisah.....	15
C. Pelaksanaan Tindak lanjut.....	16
D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP .....	16
VII. PENUTUP .....	17

## **RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)**

### **DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**

#### **I. PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang**

Sebagai kelanjutan reformasi birokrasi di bidang keuangan negara dengan mengacu kepada Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, serta untuk menciptakan *good governance* sesuai UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas KKN, maka diperlukan sistem pengendalian intern dalam mengelola keuangan Negara / daerah. Mengingat pentingnya sistem pengendalian intern, selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan turunan dari UU Nomor 1 Tahun 2004 mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai salah satu OPD pada Pemerintah Kabupaten Banyumas, menyadari sepenuhnya akan pentingnya menyelenggarakan SPIP. Didorong oleh kesadaran tersebut Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sedang, dan akan selalu menyelenggarakan SPIP. Agar sistem pengendalian intern yang dibangun efektif dan efisien diperlukan suatu rancangan yang tepat. Untuk itu, diperlukan suatu rencana tindak pengendalian yang akan menjadi penentu arah penyelenggaraan SPIP yang terintegrasi dalam setiap tindakan dan kegiatan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

##### **B. Dasar Hukum**

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Kepala BPKP nomor 05 Tahun 2021 tentang penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi.
4. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pada Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 39 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018-2023
6. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
7. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 61 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Perangkat Daerah.
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

### **C. Maksud dan Tujuan**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan dokumen yang berisi gambaran dari efektivitas, struktur, kebijakan, dan prosedur organisasi dalam mengendalikan risiko, perbaikan pengendalian yang ada/terpasang serta pengomunikasian dan pemantauan pelaksanaan perbaikannya. Dokumen ini merupakan rencana tindak pengendalian atas pelaksanaan tugas Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sehingga diharapkan dapat memperoleh keyakinan memadai bahwa tujuan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas yang telah ditetapkan dapat tercapai.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dimaksudkan untuk memberikan acuan bagi pimpinan dan para pegawai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka membangun pengendalian yang diperlukan untuk mencegah kegagalan/ penyimpangan dan/atau mempercepat keberhasilan pencapaian tujuan.

Manfaat penyusunan dokumen RTP di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas antara lain sebagai berikut :

1. Sebagai dasar pengembangan SPIP secara menyeluruh hingga tercipta keterpaduan antara sub-sub unsur SPIP dengan lingkungan pengendalian dalam aktivitas dan kegiatan sehari-hari;
2. Sebagai dasar dalam membangun instrumen pengendalian sebagai bagian dari penyelenggaraan SPIP;
3. Sebagai dasar pendokumentasian, pemantauan dan pengukuran kemajuan penyelenggaraan SPIP;
4. Sebagai dasar penyusunan Statement of Responsibilities (SOR).

## D. Ruang Lingkup

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) ini fokus kepada pengendalian atas kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) melibatkan seluruh jajaran pimpinan, tingkatan manajemen, pegawai, dan unit kerja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

### 1. Lingkungan Pengendalian.

Lingkungan pengendalian adalah lingkungan dimana pengendalian tersebut berada, yaitu meliputi antara lain : seluruh personil baik atasan maupun bawahan, integritas, nilai etika dan kompetensi personil, manajerial, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, pengawasan oleh aparat pengawasan internal, dan hubungan antar instansi.

### 2. Penilaian Risiko.

Berbagai risiko organisasi dapat menghambat dan bahkan menggagalkan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas. Oleh karena itu, risiko perlu diidentifikasi dan dianalisis seberapa besar pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan organisasi.

### 3. Kegiatan Pengendalian.

Kegiatan pengendalian mempunyai makna luas, yaitu segala upaya dan wujud yang dilakukan organisasi dalam rangka mengendalikan segala aktivitasnya agar tujuan dalam arti sempit dan luas (demensi waktu dan operasional) dapat terwujud secara efektif dan efisien. Segala upaya dan wujud sebagai manifestasi dari pengendalian intern tersebut didesain/dibangun berdasarkan penilain risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi.

### 4. Informasi dan Komunikasi.

Informasi dan komunikasi antar personil baik atasan dengan bawahan, maupun dengan instansi lain serta stakeholders merupakan urat nadi dalam organisasi. Efektivitas pengendalian intern sangat dipengaruhi oleh kualitas informasi dan komunikasi.

### 5. Pemantauan.

Pemantauan dilakukan bukan hanya dilakukan terhadap aspek operasional dan keuangan saja, namun pemantauan juga dilakukan terhadap efektivitas dan kualitas pengendalian internnya. Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan oleh atasan dan para personil organisasi. Efektivitas pengendalian intern perlu juga dievaluasi oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) maupun pihak eksternal.

## II. SEKILAS TENTANG SPIP

### A. Pengertian

Menurut Ketentuan Umum PP Nomor 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern (SPI) didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) didefinisikan sebagai Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Definisi SPI dan SPIP di atas dipahami oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas sebagai suatu mekanisme pengendalian yang ditetapkan oleh pimpinan dan seluruh pegawai serta diintegrasikan dengan proses kegiatan sehari-hari dan dilaksanakan secara berkesinambungan guna mencapai tujuan organisasi. Pencapaian tujuan organisasi tersebut harus dapat diraih dengan cara menjaga dan mengamankan aset negara/daerah yang diamanatkan kepada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, menjamin tersedianya laporan manajerial yang handal, mentaati ketentuan yang berlaku, mengurangi dampak negatif keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/*fraud*, dan pelanggaran aspek kehati-hatian, serta meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya.

### B. Tujuan SPIP

Penyelenggaraan SPIP bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

### C. Unsur-unsur SPIP

Penyelenggaraan SPIP meliputi unsur-unsur sistem pengendalian intern sebagai berikut.

#### 1. Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian adalah kondisi suatu instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Membangun lingkungan

pengendalian memiliki arti membangun dan menciptakan suatu “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terciptanya sistem pengendalian intern secara efektif. Lingkungan pengendalian yang baik merupakan kunci keberhasilan penyelenggaraan pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Lingkungan pengendalian akan efektif bila suatu lingkungan dengan orang-orang yang berkompeten memahami tanggung jawab dan batasan kewenangannya, memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kesadaran yang penuh dan komitmen untuk melakukan apa yang benar dan yang seharusnya dengan mematuhi kebijakan dan prosedur organisasi berikut standar etika dan perilaku. Peranan pimpinan dalam mewujudkan suatu lingkungan pengendalian yang baik sangat penting karena pimpinan berperan sebagai *tone at the top* (penentu “irama” organisasi).

## **2. Penilaian Risiko**

Penilaian risiko merupakan bagian integral dalam proses pengelolaan risiko dalam pengambilan keputusan pada tindakan dan kegiatan melalui tahapan identifikasi, analisis, dan evaluasi risiko.

Tahapan penilaian sbb :

1. Identifikasi risiko untuk menghasilkan suatu gambaran peristiwa yang berpotensi mengganggu pencapaian tujuan aktivitas organisasi. Dalam pelaksanaan proses identifikasi risiko perlu diperhatikan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa risiko.
2. Analisis risiko untuk mengestimasi besaran kemungkinan munculnya peristiwa risiko dan dampak yang ditimbulkan terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi apabila peristiwa risiko tersebut benar-benar terjadi, serta menetapkan level atau status risiko sebagai kombinasi hubungan antara kemungkinan dan dampak risiko.
3. Evaluasi risiko.

Tujuan Penilaian risiko untuk :

1. Mengidentifikasi dan menguraikan seluruh risiko potensial, baik yang disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal.
2. Menyusun peringkat risiko teridentifikasi berdasarkan level keutamaan prioritas perhatian dan penanganan agar dapat dikelola secara efektif.

Penilaian risiko merupakan pencerminan dari pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah.

### 3. Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian merupakan pencerminan dari aktualisasi penerapan kebijakan SPIP oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas untuk mencapai tujuan-tujuan pengendalian yang telah ditetapkan.

Kegiatan untuk mengendalikan risiko dikelompokkan dalam dua kategori yaitu : *prevention* dan *mitigation*. Pengendalian yang bersifat *prevention* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa risiko. Sedangkan pengendalian yang bersifat *mitigation* merupakan kegiatan pengendalian yang dibangun untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan apabila terjadi suatu peristiwa risiko. Kegiatan pengendalian juga dimonitor dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan eksistensi kegiatan pengendalian.

### 4. Informasi dan Komunikasi

Informasi dan komunikasi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dalam rangka penyelenggaraan SPIP merupakan proses pengumpulan dan pertukaran informasi yang dibutuhkan untuk melaksanakan, mengelola, dan mengendalikan kegiatan instansi. Informasi dan komunikasi mencakup pengumpulan dan penyajian informasi kepada pegawai agar mereka dapat melakukan tanggung-jawabnya, termasuk pemahaman akan peran dan tanggung-jawabnya sehubungan dengan pengendalian intern.

### 5. Pemantauan Berkelanjutan

Kegiatan monitoring terhadap kualitas kinerja pengendalian intern yang dilaksanakan berkelanjutan dan menyatu dalam pelaksanaan kegiatan organisasi, dengan menggunakan kriteria pemantauan sebagai acuan pelaksanaan kegiatan seperti kebijakan, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, *Standard Operating Procedures* (SOP), dan lain-lain. Pemantauan atas pengendalian intern di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada dasarnya, dilaksanakan untuk memastikan apakah sistem pengendalian intern telah berjalan sebagaimana yang diharapkan dan apakah perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan telah dilaksanakan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.



#### **D. Pernyataan Tanggung Jawab (*Statement of Responsibilities*)**

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 mengamanatkan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota/Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk memberikan pernyataan bahwa pengelolaan APBN/APBD telah diselenggarakan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pernyataan ini dibuat setiap tahun bersamaan dengan penyusunan laporan keuangan.

Pernyataan sebagaimana dikehendaki peraturan tersebut membawa konsekuensi perlunya dukungan fakta bahwa sistem pengendalian intern memang sudah diselenggarakan secara memadai. Untuk meyakini keandalan sistem pengendalian intern yang ada, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas memandang perlu menjalankan siklus penyelenggaraan SPIP setiap tahun, mulai dari identifikasi sasaran/tujuan sampai dengan pemantauan penyelenggaraan pengendalian, serta melakukan evaluasi atas efektivitas penyelenggaraan SPIP tersebut.

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) merupakan sarana untuk mendukung penyelenggaraan SPIP dan pernyataan pimpinan mengenai kondisi SPIP. Hal ini disebabkan sejauh mana realisasi atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) menunjukkan sejauh mana pengendalian telah dijalankan.

### III. PENCIPTAAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN YANG DIHARAPKAN

#### A. Tujuan Penciptaan Lingkungan Pengendalian yang Baik

Unsur lingkungan pengendalian merupakan landasan dasar dari unsur-unsur pengendalian intern lainnya sehingga unsur lingkungan pengendalian memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Lingkungan pengendalian yang baik/buruk menentukan keberhasilan/kegagalan penerapan unsur SPIP lainnya. Oleh karena itu, secara umum pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk menciptakan “atmosfir” yang kondusif yang mendorong terimplementasinya sistem pengendalian intern secara efektif di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.

Secara khusus, pembangunan lingkungan pengendalian bertujuan untuk :

1. Tegaknya integritas dan nilai-nilai etika;
2. Terciptanya komitmen terhadap kompetensi;
3. Terciptanya kepemimpinan yang kondusif;
4. Terwujudnya struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan;
5. Terwujudnya pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat;
6. Terwujudnya kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia;
7. Terwujudnya aparat pengawasan intern pemerintah yang berperan efektif; dan
8. Terwujudnya hubungan kerja yang baik antar unit kerja terkait.

#### B. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini

Berdasarkan hasil penilaian terhadap lingkungan pengendalian di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas, diperoleh gambaran sebagai berikut:

No	Sub Unsur	Kondisi
1	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	Memadai
2	Komitmen terhadap Kompetensi	Memadai
3	Kepemimpinan yang Kondusif	Memadai
4	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	Memadai
5	Pendelegasian Wewenang dan Tanggung Jawab yang Tepat	Memadai
6	Kebijakan Pengembangan SDM	Memadai

No	Sub Unsur	Kondisi
7	Pengawasan Internal yang Efektif	Memadai
8	Hubungan Kerja yang Baik dengan Instansi Pemerintah	Memadai

Sumber : aplikasi MRI Pemkab banyumas, Form 1c

### C. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian

Atas kelemahan lingkungan pengendalian yang ada saat ini, langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dan merupakan prioritas untuk segera dilaksanakan adalah sebagai berikut :

No	Sub Unsur	Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi Perbup tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.</li> <li>- Menyusun kode etik tingkat Dinas yang merupakan turunan Perbup dalam bentuk Peraturan Kepala Dinas</li> <li>- Sosialisasi kode etik tingkat Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas.</li> </ul>
II	Komitmen terhadap Kompetensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan kaderisasi staf dan mengembangkan kompetensi SDM.</li> <li>- Pelatihan yang memadai dilakukan kepada pegawai sebelum menduduki jabatan penting.</li> <li>- Mengikutsertakan diklat dan sertifikasi pegawai yang menjalankan tugas khusus</li> </ul>
III	Kepemimpinan yang Kondusif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan rapat koordinasi internal pimpinan</li> <li>- Rapat rutin pembinaan pegawai</li> </ul>
IV	Struktur Organisasi yang Sesuai dengan Kebutuhan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menenempatkan pegawai sesuai kualifikasi yang dimiliki;</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kebutuhan dan ketersediaan SDM.</li> </ul>

<b>No</b>	<b>Sub Unsur</b>	<b>Rencana Tindak Perbaikan/ Penguatan Lingkungan Pengendalian</b>
V	Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan reuiu dan evaluasi secara berjenjang terhadap kinerja aparatur di lingkungan DPU.</li> <li>- Melakukan komunikasi tentang wewenang dan tanggung jawab secara jelas.</li> <li>- Melaksanakan pendelegasian wewenang dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan.</li> </ul>
VI	Penyusunan dan Penerapan kebijakan yang sehat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi di lingkungan intern Dinas PU setiap ada peraturan baru</li> </ul>
VII	Perwujudan Peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Efektif.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- APIP memberikan materi / pembekalan SPIP</li> <li>- APIP melakukan evaluasi pelaksanaan pengendalian intern secara periodik</li> <li>- APIP melakukan review atas kepatuhan hukum dan peraturan lainnya.</li> <li>- Menindaklanjuti saran/ rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan APIP.</li> </ul>
VIII	Hubungan Kerja yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi dengan pihak terkait, setiap pelaksanaan kegiatan yang terkait pihak lains</li> </ul>

## IV. RISIKO DAN KEGIATAN PENGENDALIAN

### A. Pernyataan Tujuan

Penyelenggaraan SPIP dimaksudkan untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan organisasi. Pemberian keyakinan tersebut dicapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam upaya mendukung pemerintah kabupaten banyumas dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur dasar yang merata dan memadai sebagai daya ungkit pembangunan. Dalam tahun 2022, Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang disusun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas diprioritaskan untuk pengendalian dalam rangka mencapai tujuan Dinas PU yaitu Persentase Kinerja Infrastruktur Pekerjaan Umum, dan sejumlah sasaran sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan
2. Meningkatnya Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur SDA
3. Menyediakan Sistem Drainase yang memadai
4. Mewujudkan dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas
5. Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Bangunan Gedung

### B. Risiko-risiko

Berdasarkan hasil penilaian atas risiko yang mengancam pencapaian tujuan, terdapat risiko-risiko yang menjadi prioritas untuk ditangani.

Tujuan DPU : **Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum**

Risiko :

1. **Adanya resiko meningkatnya merusakkan infrastruktur irigasi**
2. **Terdapat wilayah potensi rawan longsor**
3. **Meningkatnya merusakkan jaringan drainase**
4. **Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah**
5. **Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik**

Sedangkan risiko-risiko yang mengancam sasaran meliputi risiko yang teridentifikasi berdasarkan permasalahan yang ditemukan oleh pihak auditor dan risiko yang teridentifikasi melalui diskusi manajemen, yaitu:

#### 1. Risiko atas pencapaian Sasaran 1

“Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA” :

1. Adanya resiko meningkatnya merusakkan infrastruktur irigasi;

2. Terdapat wilayah potensi rawan longsor;

**2. Risiko atas pencapaian Sasaran 2 :**

“Menyediakan Sistem Drainase yang memadai”:

1. Meningkatnya kerusakan jaringan drainase;

**3. Risiko atas pencapaian Sasaran 3 :**

“Mewujudkan dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas” :

1. Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan;

**4. Risiko atas pencapaian Sasaran 4 :**

“Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Bangunan Gedung” :

1. Bertambahnya kerusakan Gedung Pemerintahan Daerah;

**5. Risiko atas pencapaian Sasaran 5 :**

“Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan” :

1. Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik;

**C. Kegiatan Pengendalian Terpasang**

Sampai dengan saat ini, di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas telah membangun berbagai pengendalian. Beberapa pengendalian dinilai telah efektif namun beberapa lainnya kurang/tidak efektif mengatasi risiko dalam upaya pencapaian tujuan. Pengendalian yang telah terpasang, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi database rawan bencana, prioritas penanganan, Pembentukan Satgas TRC, Penanganan darurat
2. Optimalisasi database kerusakan, prioritas penanganan, Koordinasi lintas bidang terakit
3. Review SK Jalan Kabupaten, Optimalisasi database kerusakan Jalan, prioritas penanganan
4. Pembaharuan database kerusakan bangunan gedung pemerintah, prioritas penanganan.

**D. Kegiatan Pengendalian yang Masih Dibutuhkan**

Dalam rangka meningkatkan efektivitas penanganan risiko, beberapa kegiatan pengendalian yang telah ada perlu ditingkatkan dan beberapa kegiatan pengendalian baru perlu dibangun. Pembangunan kegiatan pengendalian didasarkan kepada upaya untuk mengurangi kemungkinan munculnya penyebab risiko dan upaya untuk mengurangi dampak apabila risiko benar-benar terjadi.

Sebagian kegiatan pengendalian yang dibangun didasarkan kepada rekomendasi pihak auditor.

Kegiatan pengendalian yang Sudah Ada yang masih perlu dibutuhkan :

1. Optimalisasi penanganan, usulan penambahan anggaran, mencari sumber pendanaan di Provinsi atau pusat
2. Update data Jalan Kabupaten, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis
3. Pembuatan data genangan, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis
4. Optimalisasi Prioritas penanganan, mengefektifkan TRC, UPTD Teknis

## V. INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Informasi dan komunikasi yang dimaksud dalam RTP ini adalah informasi dan komunikasi yang dibutuhkan dalam rangka mendukung berjalannya pengendalian yang dibangun. Informasi dan komunikasi yang perlu diselenggarakan terkait dengan pengendalian yang dibangun sesuai yang direncanakan dalam RTP meliputi:

- Sosialisasi tatap muka tentang Kode Etik dan Perilaku Aparatur dan Peraturan kepegawaian yang ada pada seluruh pegawai.
- Pembuatan surat edaran/pengumuman tentang pelaksanaan diklat, evaluasi kompetensi, revidi kinerja, dan penempatan SDM.
- Sosialisasi SOP yang ada
- Penayangan Program / Kegiatan melalui Sistem Informasi Rencana Unit Pengadaan (SIRUP).
- Surat edaran, tatap muka dengan penyedia jasa (pihak ke-3)
- Informasi perkembangan dan kendala kegiatan yang ada melalui rapat koordinasi secara rutin satu bulan sekali dan rapat insidental pada kegiatan yang mendesak.



## **VI. PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pemantauan dan evaluasi atas pengendalian intern pada dasarnya ditujukan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif mengatasi risiko dan apakah tindakan perbaikan yang diperlukan telah dilaksanakan. Pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan meliputi:

### **A. Pemantauan Berkelanjutan**

Pemantauan berkelanjutan adalah aktivitas monitoring kinerja pengendalian intern dilaksanakan secara menyatu dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang/Unit Kerja, baik dalam tahap input (perencanaan kegiatan), tahap proses pelaksanaan kegiatan, tahap output (hasil kegiatan) maupun tahap outcome (berfungsinya hasil kegiatan). Kriteria yang digunakan dalam proses pemantauan antara lain berupa kebijakan, pedoman, prosedur, Juklak/Juknis, RKA dan dokumen lain yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.

Penyelenggaraan pemantauan berkelanjutan terhadap kualitas pelaksanaan pengendalian intern didukung oleh berbagai instrument pengendalian yaitu :

1. Sistem pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti pelaporan realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, pelaporan realisasi penyerapan anggaran.
2. Sistem pelaporan penyelenggaraan SPIP.
3. Proses pemantauan langsung dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas dan unsur-unsur pelaksana kegiatan terkait.

### **B. Evaluasi Terpisah.**

Inspektorat Kabupaten Banyumas melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP pada kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas pada akhir tahun. Evaluasi bertujuan untuk meyakinkan apakah pengendalian intern yang terpasang telah berjalan efektif. Evaluasi mencakup penilaian secara khusus terhadap efektivitas setiap komponen pengendalian intern. Hasil pelaksanaan evaluasi terpisah dituangkan dalam simpulan mengenai pelaksanaan pengendalian intern dan saran aktivitas yang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan pengendalian intern.

Berdasarkan saran perbaikan system pengendalian intern tersebut, Kepala Dinas melaksanakan tindak lanjut yang relevan yang diyakini dapat meminimalkan terjadinya penyimpangan di masa datang.

### **C. Pelaksanaan Tindak lanjut**

Sebagai bagian dari penyelenggaraan dan perbaikan SPIP, atas setiap rekomendasi hasil audit/evaluasi/reviu dari auditor eksternal maupun internal, setiap unit kerja OPD melaksanakan tindak lanjutnya. Tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas terhadap temuan dan rekomendasi hasil audit atau reviu lainnya adalah :

- a. Melaksanakan tindak lanjut yang layak sesuai dengan materi temuan dan rekomendasi.
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tindak lanjut dan status penyelesaian rekomendasi kepada auditor secara berkala.
- c. Memantau perkembangan pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi guna meyakinkan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan.

### **D. Pemantauan atas Pelaksanaan RTP**

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas memberikan laporan atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) sesuai tanggungjawabnya secara berkala kepada tim pemantau. Hasil pemantauan tim pemantau dilaporkan kepada Bupati Banyumas.


**VII. PENUTUP**

Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Banyumas Tahun 2022 merupakan salah satu dokumen penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mewujudkan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Strategis ini menjadi *instrument* untuk merencanakan sekaligus memantau capaian perbaikan/ pembangunan infrastruktur pengendalian intern agar berjalan efektif, efisien dan mencapai tujuan/sasaran. Komitmen dari segenap manajemen dan seluruh pegawai serta ditunjang manajemen yang profesional, efektif, efisien, transparan serta akuntabel diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengendalian penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

**Purwokerto, 31 Maret 2022**

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum  
Kabupaten Banyumas**



**KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST, M.Si.**  
**NIP. 19671229 199002 1 002**

**CEE Berdasarkan Dokumen Kondisi Kerentanan Lingkungan Pengendalian Intern  
Dinas Pekerjan Umum Daerah Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas			
Tahun Penilaian	: 2022			
Urusan Pemerintahan	: Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			
No.	Sumber data	Kelemahan	Kekuatan	Unsur
a	b	c	d	e
1	Surat Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700/141.OP/27/IRB/2020 Tanggal 19 Maret 2020.	Satuan Tugas SPIP belum sepenuhnya memperhatikan pengendalian intern dan pengelolaan risiko saat pengawasan	SK SPIP, SK RTP, SK UPG,Evaluasi SPIP,	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF
2	Surat Bupati Banyumas Atas tindak lanjut LHP LKPD TA BPK RI Tahun 2019 Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (LHP Nomor 99A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020, Nomor 99B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020, Nomor 99C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020	Satgas SPIP masih kurang melakukan pembinaan pengawasan	Sebagian besar pengawasan telah dilakukan dengan baik, baik kontaktual maupun non kontraktual.	PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF

**PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS OPD  
Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Banyumas**

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Banyumas	
Tahun Penilaian	: 2022	
Periode Yang dinilai	: RPJMD Perubahan 2018-2023	
Urusan Pemerintahan OPD yang Dinilai	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar : DPU	
Sumber Data	: Renstra Perubahan 2018-2023	
Tujuan Strategis	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum	
Sasaran Strategis	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	
	Menyediakan Sistem Drainase yang memadai	
	Mewujudkan dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Bangunan Gedung	
	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	
Indikator Kinerja Sasaran Renstra OPD	IKU	
	1	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik : 72.7 %
	2	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik : 81.1 %
	3	Prosentase Jumlah wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik : 93.05 %
	4	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina : 76.35 %
	5	Persentase panjang jaringan drainase kondisi baik : 71.89 %
	6	Persentase luas kawasan rawan longsor yang diamankan : 53 %
Informasi Lain	-	
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<u>Tujuan 1:</u> Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum	
	<u>Sasaran 1.1:</u> Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	
	<u>Ind Sasaran 1.1.1:</u> Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	
	<u>Program 1.1.1.1:</u> PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	
	<u>Ind Sasaran 1.1.2:</u> Persentase luas kawasan rawan longsor yang diamankan	
	<u>Program 1.1.2.1:</u> PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR	
	<u>Sasaran 1.2:</u> Menyediakan Sistem Drainase yang memadai	
	<u>Ind Sasaran 1.2.1:</u> Persentase panjang jaringan drainase kondisi baik	
	<u>Program 1.2.1.1:</u> PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
	<u>Sasaran 1.3:</u> Mewujudkan dukungan Jasa Konstruksi yang berkualitas	
	<u>Ind Sasaran 1.3.1:</u> Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina	
	<u>Program 1.3.1.1:</u> PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
	<u>Sasaran 1.4:</u> Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Bangunan Gedung	
	<u>Ind Sasaran 1.4.1:</u> Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	
	<u>Program 1.4.1.1:</u> PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
	<u>Program 1.4.1.2:</u> PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
	<u>Sasaran 1.5:</u> Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	
<u>Ind Sasaran 1.5.1:</u> Prosentase Jumlah wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik		
<u>Program 1.5.1.1:</u> PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN		

Purwokerto, 18 Maret 2022  
KEPALA DPU  
KABUPATEN BANYUMAS

**KRESNAWAN WAHYU KRISTOYO, ST, M.Si**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671229 199002 1 002

## FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RESIKO STRATEGIS OPD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten BANYUMAS, Provinsi Jawa Tengah  
 Nama OPD : Dinas Pekerjaan Umum  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Periode yang dinilai : RPJMD Perubahan 2018-2023  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar  
 OPD yang Dinilai : Dinas Pekerjaan Umum

NO	Tujuan	NO	Sasaran Strategis	NO	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/UC	Uraian	Pihak yang Terkena	
1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum	1	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur SDA	1	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik		103000000100	Kurangnya pemeliharaan Irigasi karena anggaran yang terbatas, dan belum dianggap sebagai prioritas	Internal	C	pelayanan air irigasi tidak maksimal	Pemkab Banyumas; DPU; Masyarakat;	DPU	
								Kegagalan konstruksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Fisik Infrastruktur Irigasi	Internal	C	pelayanan air irigasi tidak maksimal	Pemkab Banyumas; DPU; Masyarakat;	DPU	
				2	Persentase luas kawasan rawan longsor yang diamankan		103000000100	Belum seluruh titik rawan longsor diamankan (Bangunan pengaman); Umur konstruksi; gagal konstruksi; tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	Internal	C	Wilayah / titik potensi rawan longsor meningkat	Pemkab Banyumas; DPU; Masyarakat;	DPU	
								Kurangnya pemeliharaan bangunan pengaman karena anggaran yang terbatas, dan belum dianggap sebagai prioritas	Internal	C	Wilayah / titik potensi rawan longsor meningkat	Pemkab Banyumas; DPU; Masyarakat;	DPU	
						Cuaca ekstrim; Kondisi geografis;	Eksternal	UC	Wilayah / titik potensi rawan longsor meningkat	Pemkab Banyumas; DPU; Masyarakat;	DPU			
		2	Menyediakan Sistem Drainase yang memadai	3	Persentase panjang jaringan drainase kondisi baik		103000000100	Umur Konstruksi; Gagal konstruksi; Tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	Internal	C	Meningkatnya luas genangan	Pemkab Banyumas; DPU; Masyarakat;	DPU	
								Kurangnya pemeliharaan Drainase karena anggaran yang terbatas, dan belum dianggap sebagai prioritas	Internal	C	Meningkatnya luas genangan	Pemkab Banyumas; DPU; Masyarakat;	DPU	
Curah hujan ekstrim sehingga kapasitas drainase tidak mencukupi	Eksternal							UC	Meningkatnya luas genangan	Pemkab Banyumas; DPU; Masyarakat;	DPU			
3	Mewujudkan dukungan Jasa Konstruksi yang	4	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dibina		103000000100	Penyedia jasa tidak menghadiri acara pembinaan	Eksternal	C	Penyedia Jasa konstruksi tidak memperoleh pembinaan	Pemkab Banyumas; DPU; Masyarakat;	DPU			

N O	Tujuan	N O	Sasaran Strategis	N O	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			Dampak		SKPD
						Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	C/U C	Uraian	Pihak yang Terkena	
		4	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Bangunan Gedung	5	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah Daerah dalam Kondisi Baik	Bertambahnya kerusakan Gedung Pemerintahan Daerah		1030000000100	Umur Konstruksi; Gagal konstruksi; Tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran;	Internal	C	pelayanan publik, di gedung-gedung pemerintah tidak maksimal	Pemkab Banyumas; DPU; SKPD lain (Pengguna Gedung Pemerintah); Masyarakat;	DPU
									Kurangnya pemeliharaan Gedung karena anggaran yang terbatas, dan belum dianggap sebagai prioritas	Internal	C	pelayanan publik, di gedung-gedung pemerintah tidak maksimal	Pemkab Banyumas; DPU; SKPD lain (Pengguna Gedung Pemerintah); Masyarakat;	DPU
		5	Meningkatnya Kualitas dan kuantitas jaringan jalan	6	Prosentase Jumlah wilayah yang terkoneksi oleh jalan dalam kondisi baik	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik		1030000000100	Kegagalan konstruksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Fisik Infrastruktur Jalan	Internal	C	Menurunnya tingkat kondisi baik jalan, sehingga Pemanfaatan fungsi jalan tidak maksimal	Pemkab Banyumas; DPU; Masyarakat;	DPU
									Kurangnya pemeliharaan Jalan karena anggaran yang terbatas, dan belum menjadi prioritas	Internal	C	Menurunnya tingkat kondisi baik jalan, sehingga Pemanfaatan fungsi jalan tidak maksimal	Pemkab Banyumas; DPU; Masyarakat;	DPU

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko																																			
			R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32			
a	b	c																																			
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>																																				
1	Adanya resiko meningkatnya kerusakan infrastruktur irigasi	RSO.22	6	6	5	5	3	3	3	2	4	3	3	2	4	2	3	3	4	4	3	3	1	4	3	3	3	4	4	3	3	3	1	2	2	3	
2	Terdapat wilayah potensi rawan longsor	RSO.22	6	6	4	3	4	3	4	4	4	3	5	4	5	2	3	3	5	5	5	3	2	4	5	4	3	5	5	4	4	4	3	3	4	3	
3	Meningkatnya kerusakan jaringan drainase	RSO.22	6	6	4	3	4	3	3	2	3	3	2	1	3	2	3	3	3	3	2	3	1	2	4	4	3	4	4	3	3	3	5	2	2	3	
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.22	6	6	4	2	3	3	2	2	2	4	5	1	3	2	3	2	3	3	4	1	2	2	3	1	2	4	3	1	4	1	2	2	1	2	
5	Bertambahnya kerusakan Gedung Pemerintahan Daerah	RSO.22	6	6	3	3	3	3	3	2	3	3	3	1	2	2	3	2	2	2	2	3	2	4	2	2	2	3	2	2	4	1	2	2	2	2	
6	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik	RSO.22	6	6	3	2	3	3	2	2	2	3	4	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	4	5	3	2	4	3	1	3	2	2	2	2	2	
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>																																				
1	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	ROO.22	103	6	6	3	1	1	2	3	2	1	2	3	1	2	3	2	3	2	3	3	2	2	1	3	3	2		1	3	3	1	3	4	1	3
2	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Infrastruktur SDA	ROO.22	103	6	6	3	1	1	3	3	3	2	2	3	1	2	3	2	2	1	1	3	2	3	1	3	3	3		3	3	2	2	3	3	1	4
3	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Jalan akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan)	ROO.22	103	6	6	3	1	1	2	3	2	3	3	1	2	4	2	2	4	1	4	2	3	3	3	3	3		2	4	2	4	3	4	1	4	
4	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.22	103	6	6	3	1	1	2	3	2	2	3	3	1	2	5	2	2	3	2	3	2	3	3	3	3		3	3	2	3	3	4	1	3	



No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko																																				
				R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32			
a	b	c																																				
5	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan	ROO.22	103	6	6	3	1	1	2	4	2	2	3	3	1	2	3	2	3	4	3	3	2	3	3	3	4		3	4	2	2	3	3	1			
6	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	ROO.22	103	6	6	3	1	1	2	3	2	3	3	2	1	3	3	2	4	4	4	4	2	3	1	3	2	3	2	2	4	2	3	2	2	2	5	
7	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil	ROO.22	103	6	6	3		1	2	3	2	2	3	3	1	3	2	3	3	5	3	2	3	3	1	3	3	4	2	5	5	2	3	3	2	3	2	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi kurang optimal	ROO.22	103	6	6	3	1	1	2	3	2	3	3	3	1	3	3	3	2	4	1	4	3	4	2	3	4	3		3	4	2	2	4	3	1	4	
9	Terdapat dokumen Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang gagal terbit	ROO.22	103	6	6	3	2	1	2	3	2	2	2	2	1	1	2	3	1	3	3	3	2	3	3	3	3	2	1	3	1	2	3	4	1	2		
10	Belum seluruhnya Badan Usaha Jasa Konstruksi yang di Kabupaten Banyumas terawasi	ROO.22	103	6	6	3	2	1	2	3	2	3	2	4	1	3	3	3	2	4	3	2	2	2	2	2	3	2	4	2	3	4	2		2	4	1	1
11	Kurang optimalnya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	ROO.22	103	6	6	3	1	1	3	3	3	2	3	3	1	2	5	3	3	4	2	3	2	1	2	3	3	3	2	3	4	2	3	3	4	1	2	
12	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan	ROO.22	103	6	6	3	1	1	4	3	4	2	3	4	1	3	4	3	3	4	3	4	3	2	3	3	2	3	2	2	5	2	3	2	2	1		
13	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan.	ROO.22	103	6	6	3	1	2	4	3	4	2	4	2	1	3	4	3	2	4	4	3	3	3	3	3	3	4	3		5	3	3	3	2	1	4	
14	Peran / dukungan Kelembagaan Pengelola SDA masih kurang	ROO.22	103	6	6	3	1	2	3	3	3	2	3	3	1	2	3	3	2	4	2	2	2	2	2	2	3	2	3	3	1	4	2	3	2	2	1	4
15	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan.	ROO.22	103	6	6	3	1	4	4	3	4	2	3	3	1	2	4	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2		3	3	1	1	
16	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi AKNPI	ROO.22	103	6	6	3	1	2	4	3	4	3	2	3	1	2	4	3	4	4	4	2	2	3	3	3	4	4	3	3	4	2	3	4	2	2	2	

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko																																			
						R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32
a	b	c																																			
17	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	2	4	3	2	3	2	2	4	
18	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakan	ROO.22	103	6	6	3	1	4	3	3	3	2	3	3	1	3	3	3	4	4	5	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	2	4
19	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan	ROO.22	103	6	6	3	1	1	3	3	3	3	3	3	1	2	3	3	3	4	4	3	3	1	3	3	2	4	3	3	4	2	2	2	3	1	3
20	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.22	103	6	6	3	1	1	3	3	3	2	3	2	1	1	3	3	4	4	2	4	3	2	2	3	2	4	3	3	4	1	3	2	3	1	1
21	Bangunan gedung pemerintah tidak terpelihara dengan baik	ROO.22	103	6	6	3	1	1	3	3	3	3	3	2	1	1	3	2	4	4	2	4	2	2	3	3	3	3	2	1	3	2	3	3	4	1	2
22	Bangunan Gedung Cagar Budaya belum dilestarikan secara maksimal	ROO.22	103	6	6	3	2	1	2	3	2	3	3	2	2	2	2	2	3	4	2	2	2	2	3	3	3	5	2	3	5	3	2	3	3	1	3



No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko		Skala Dampak *)																																	
				R3 3	R3 4	R3 5	R3 6	R3 7	R3 8	R3 9	R4 0	R4 1	R4 2	R4 3	R4 4	R4 5	R4 6	R4 7	R4 8	R4 9	R5 0	R5 1	R5 2	R5 3	R5 4	R5 5	R5 6	R5 7	R5 8	R5 9	R6 0	R6 1	R6 2	R6 3	R6 4		
a	b	c		d																																	
5	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan	ROO.22	103	6	6	4	4	3	3	3	2	3	1	2	4	3	4	3	3	3	1	3	2	2	2	5	2	2	3	4	3	3	5	4	4	3	2
6	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	ROO.22	103	6	6	2	2	3	2	4	1	4	1	2	3	2	3	3	2	3	2	4	2	2	2	3	2	3	3	2	3	2	2	2	4	3	2
7	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil	ROO.22	103	6	6	3	4	3	3	3	1	3	1	2	5	2	3	3	2	5	2	3	3	2	4	2	3	2	3	2	3	1	2	4	2	2	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi kurang optimal	ROO.22	103	6	6	3	4	3	4	1	1	1	1	2	5	2	3	3	3	5	2	2	3	2	2	4	2	3	2	3	2	4	4	1	3	3	2
9	Terdapat dokumen Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang gagal terbit	ROO.22	103	6	6	2	4	3	3	3	1	3	1	2	5	2	3	3	4	2	1	1	3	2	2	4	1	2	1	2	3	3	2	3	3	3	2
10	Belum seluruhnya Badan Usaha Jasa Konstruksi yang di Kabupaten Banyumas terawasi	ROO.22	103	6	6	2	4	3	2	3	1	3	1	2	5	2	3	3	4	5	1	2	3	2	2	4	2	3	3	2	2	2	1	2	4	3	2
11	Kurang optimalnya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	ROO.22	103	6	6	2	5	3	3	2	2	2	1	2	4	3	3	3	4	4	2	3	3	2	2	4	2	4	2	2	3	3	2	1	4	3	3
12	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan	ROO.22	103	6	6	2	5	3	2	3	2	3	1	3	5	3	3	3	2	3	2	3	3	2	2	5	2	4	1	2	3	2	4	2	3	3	4
13	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan.	ROO.22	103	6	6	4		3	3	4	3	4	2	3	5	4	3	3	2	4	2	2	3	2	2	5	2	3	3	4	3	3	4	2	4	3	4
14	Peran / dukungan Kelembagaan Pengelola SDA masih kurang	ROO.22	103	6	6	3	4	3	2	2	1	2	2	2	3	1	3	3	3	4	2	2	3	2	2	5	2	3	2	3	3	2	1	1	3	3	3
15	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan.	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	3	2	3	4	2	5	3	3	3	2	4	1	4	3	2	2	5	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	4
16	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi AKNPI	ROO.22	103	6	6	4	3	3	4	4	1	4	2	2	5	2	3	3	2	3	1	4	3	2	2	5	2	3	1	4	3	4	4	1	4	3	4

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko				Skala Dampak *)																																	
						R3 3	R3 4	R3 5	R3 6	R3 7	R3 8	R3 9	R4 0	R4 1	R4 2	R4 3	R4 4	R4 5	R4 6	R4 7	R4 8	R4 9	R5 0	R5 1	R5 2	R5 3	R5 4	R5 5	R5 6	R5 7	R5 8	R5 9	R6 0	R6 1	R6 2	R6 3	R6 4		
a	b	c				d																																	
17	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.22	103	6	6	2	4	3	3	4	2	4	3	2	5	4	4	3	2	4	1	4	3	2	2	5	2	4	2	2	3	3	4	2	3	3	3		
18	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakan	ROO.22	103	6	6	3	4	3	3	5	2	5	4	2	5	3	4	3	3	4	1	4	3	2	2	5	2	4	1	3	3	3	3	3	3	1	5	3	3
19	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan	ROO.22	103	6	6	2	2	3	2	4	2	4	1	2	4	3	4	3	2	4	1	3	3	2	2	4	2	3	1	2	3	2	1	2	4	3	3		
20	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.22	103	6	6	4	2	3	2	2	3	2	1	2	4	3	3	3	2	5	1	4	3	2	2	4	2	3	2	4	3	2	2	3	4	3	3		
21	Bangunan gedung pemerintah tidak terpelihara dengan baik	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	2	3	2	1	2	4	4	3	3	4	3	2	4	2	2	2	5	2	3	5	3	3	3	3	3	1	5	4	3	
22	Bangunan Gedung Cagar Budaya belum dilestarikan secara maksimal	ROO.22	103	6	6	4	4	3	3	2	3	2	1	2	5	2	3	3	3	5	2	3	2	2	2	4	2	3	1	4	2	3	3	2	5	2	2		

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	R6 R6 R6 R6 R6 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9																																		
			5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6			
a	b	c																																			
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>																																				
1	Adanya resiko meningkatnya kerusakan infrastruktur irigasi	RSO.22	6	6	3	2	2	5	4	3	2	2	2	2	3	4	2	3	4	3	5	3	4	3	4	3	2	2	3	3	2	3	3	4	4	2	
2	Terdapat wilayah potensi rawan longsor	RSO.22	6	6	4	2	5	5	5	3	4	4	3	4	4	4	5	3	4	4	5	4	4	4	5	4		5	3	3	3	4	3	5	4	5	
3	Meningkatnya kerusakan jaringan drainase	RSO.22	6	6	3	2	5	5	4	3	3	3	1	2	4	3	1	3	4	4	5	3	4	3	4	3	3	4	3	3	3	4	3	4	3	2	
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.22	6	6	2	1	4	2	3	3	3	3	2	2	1	2	3	3	2	1	5	2	4	1	5	3	1	2	3	1	2	1	3	3	4	1	
5	Bertambahnya kerusakan Gedung Pemerintahan Daerah	RSO.22	6	6	3	1	1	3	2	3	2	2	1	2	2	4	5	3	2	2	4	3	4	2	3	2	3	4	3	3	2	2	2	3	4	2	
6	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik	RSO.22	6	6	4	2	4	5	3	3	3	3	3	2	3	2	1	3	2	3	4	2	4	2	4	2	3	5	2	3	2	3	2	2	5	2	
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>																																				
1	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	ROO.22	103	6	6	3	2	2	3	4	2	2	2	2	3	2	2	5	2	2	4	1	3	1	2	2	2	1	2	2	3	2	1	4	3	2	1
2	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Infrastruktur SDA	ROO.22	103	6	6	3	3	2	3	2	2	2	3	3	3	3	5	2	3	4	1	3	2	2	2	2	1	2	2	3	3	3	4	3	2	1	
3	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Jalan akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan)	ROO.22	103	6	6	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	2	4	3	3	2	5	2	3	1	3	2	2	1	3	2	2	2	5	3	3	2	2
4	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.22	103	6	6	3	2	3	3	2	2	3	4	2	3	1	3	4	3	2	4	2	3	1	4	2	2	1	4	2	2	2	3	4	3	2	1

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko		R6 R6 R6 R6 R6 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9																																		
				5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6			
a	b	c																																				
5	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan	ROO.22	103	6	6	3	2	3	3	2	2	3	4	2	2	3	4	4	3	2	4	2	4	1	4	2	1	1	4	2	2	3	1	4	3	2	2	
6	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	ROO.22	103	6	6	3	2	2	2	2	2	2	2	2	3	2	3	4	2	2	4	1	3	2	2	2	2	1	2	2	3	4	3	4	3	2	3	
7	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil	ROO.22	103	6	6	2	2	2	3	4	3	1	3	2	2	1	5	4	1	2	3	1	3	2	3	2	2	1	3	2	4	3	1	4	3	2	4	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi kurang optimal	ROO.22	103	6	6	3	2	2	4	4	2	1	3	2	3	3	3	3	1	2	3	1	3	2	3	2	2	1	3	2	4	2	1	4	3	2	3	
9	Terdapat dokumen Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang gagal terbit	ROO.22	103	6	6	2	2	2	3	4	2	3	2	2	4	2	4	3	2	2	5	3	4	1		2	2	1	2	2	2	1	3	4	3	2	2	
10	Belum seluruhnya Badan Usaha Jasa Konstruksi yang di Kabupaten Banyumas terawasi	ROO.22	103	6	6	3	2	2	2	4	3	1	2	2	4	2	4	4	1	2	4	1	3	1	2	2	2	1	2	2	3	2	3	4	3	2	4	
11	Kurang optimalnya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	ROO.22	103	6	6	3	3	2	3	2	2	2	2	3	4	3	3	4	2	2	4	2	3	1	2	2	2	1	2	2	3	3	3	4	3	2	4	
12	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan	ROO.22	103	6	6	3	4	3	2	2	2	3	2	4	3	2	3	4	2	4	4	2	4	1	2	2	2	2	2	2	4	3	2	5	3	2	5	
13	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan.	ROO.22	103	6	6	3	4	1	3	3	2	3	4	4	4	2	4	4	2	4	5	2	4	1	4	2	2	1	4	2	3	2	2	4	3	2	5	
14	Peran / dukungan Kelembagaan Pengelola SDA masih kurang	ROO.22	103	6	6	3	3	1	2	2	3	1	3	3	3	1	4	4	1	3	3	1	3	2		2	2	1	3	3	3	3	2	1	4	3	2	3
15	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan.	ROO.22	103	6	6	3	4	2	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	2	4	3	2	4	2	3	2	2	2	3	3	3	4	3	5	3	2	5	
16	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi AKNPI	ROO.22	103	6	6	3	4	2	4	4	3	3	2	4	4	2	4	4	2	4	4	2	3	2	2	2	2	1	4	3	3	4	2	5	3	2	4	

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko				R6 R6 R6 R6 R6 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R7 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R8 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9																																
						5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	
a	b	c																																				
17	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	4	3	3	2	3	3	1	4	4	2	3	4	2	3	2	2	2	2	1	2	3	3	4	4	4	3	2	5	
18	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakan	ROO.22	103	6	6	3	3	2	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	2	3	3	2	2	3	3	2	2	1	3	4	3	4	1	5	3	2	3	
19	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan	ROO.22	103	6	6	3	3	2	2	4	3	3	2	3	4	3	5	3	2	3	4	2	3	3	2	2	2	2	2	3	3	3	2	4	3	2	2	
20	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.22	103	6	6	3	3	1	2	2	3	3	4	3	3	2	4	3	1	3	4	1	3	1	4	2	2	1	4	3	4	4	1	4	3	2	3	
21	Bangunan gedung pemerintah tidak terpelihara dengan baik	ROO.22	103	6	6	2	3	1	3	4	2	3	3	3	4	1	4	3	2	3	4	2	3	2	3	2	2	1	3	3	3	4	4	4	4	3	2	2
22	Bangunan Gedung Cagar Budaya belum dilestarikan secara maksimal	ROO.22	103	6	6	2	2	1	3	2	2	3	4	2	3	4	5	3	2	2	3	2	4	2	4	2	2	1	4	3	4	3	2	4	3	2	3	



				Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Penilaian : 2022 Tujuan Strategis : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																										
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	R9 R9 R9 R1																				Skor Skala Rata Rata							
			7	8	9	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19	20			
a	b	c																					e							
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>																													
1	Adanya resiko meningkatnya merusakkan infrastruktur irigasi	RSO.22		6	6	3	3	3	3	2	2	2	3	4	5	4	4	4	1	1	3	3	3	4	1	1	2	3	3	3,00
2	Terdapat wilayah potensi rawan longsor	RSO.22		6	6	4	3	4	3	2	4	4	3	3	5	4	4	5	1	4	3	3	4	5	3	4	5	3	4	3,80
3	Meningkatnya merusakkan jaringan drainase	RSO.22		6	6	4	3	3	3	2	2	3	3	4	4	3	4	1	1	3	3	3	4	1	2	3	3	3	3	3,02
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.22		6	6	2	1	4	3	4	2	2	3	3	2	3	3	1	1	2	3	3	3	1	2	4	2	3	2,53	
5	Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah	RSO.22		6	6	3	3	3	2	2	2	2	3	2	4	3	2	1	2	2	3	2	5	1	1	3	2	2	2,48	
6	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik	RSO.22		6	6	2	3	4	3	2	2	2	3	3	3	2	2	3	1	1	2	3	2	5	1	1	3	2	3	2,71
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>																													
1	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	ROO.22	103	6	6	1	3	3	2	1	2	2	3	2	3	3	2	2	5	2	1	3	3	3	1	1	4	3	2	2,37
2	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Infrastruktur SDA	ROO.22	103	6	6	1	3	3	2	1	2	2	3	2	3	3	2	2	5	3	1	3	3	3	1	1	4	3	2	2,43
3	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Jalan akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan)	ROO.22	103	6	6	1	3	3	3	2	3	2	4	2	3	3	3	2	2	3	2	3	3	4	2	5	2	4	2	2,64
4	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.22	103	6	6	1	3	3	3	2	3	2	4	2	3	3	3	2	1	3	2	3	3	4	2	5	2	4	2	2,61







No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko																																		
					R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32
a	b	c																																		
3	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Jalan akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan)	ROO.22	103	6	6	3	3	2	2	2	2	2	3	3	1	1	1	2	3	2	2	2	2	2	4	2	1	1	3	1	3	1	1	4	3	
4	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.22	103	6	6	3	3	2	2	2	2	2	3	3	2	1	2	2	3	2	2	2	2	3	4	2	1	2	4	2	4	1	1	4	3	
5	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan	ROO.22	103	6	6	3	3	2	2	2	2	2	4	3	3	1	3	2	3	2	2	2	2	2	3	2	1	3	4	3	2	2	1	3	3	
6	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	ROO.22	103	6	6	3	3	2	2	2	2	2	3	3	4	1	4	2	3		2	2	2	2	2	2	1	4	2	4	2	1	1	3	3	
7	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil	ROO.22	103	6	6	3	3	2	2	3	2	3	1	3	3	2	3	2	3	1	2	3	2	3	1	1	2	3	3	3	3	1	1	2	3	
8	Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi kurang optimal	ROO.22	103	6	6	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	1	1	1	1	3	2	2	2	2	4	5	1	1	1	3	1	3	1	1	3	3
9	Terdapat dokumen Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang gagal terbit	ROO.22	103	6	6	2	3		2	3	2	3	2	3	2	3		3	1	3	2	2	2	2	2	3	2	2	3	2	3	2	1	1	3	2
10	Belum seluruhnya Badan Usaha Jasa Konstruksi yang di Kabupaten Banyumas terawasi	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	2	3	2	3	3	3	1	3	2	3	2	2	2	2	3	3	2	1	3	2	3	2	1	1	4	3	

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko																																					
				R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32				
a	b	c																																					
11	Kurang optimalnya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	1	2		3	2	2	2	2	2	2	4	2	1	2	2	2	2	2	1	3	3		
12	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan	ROO.22	103	6	6	3	3	2	2	3	2	3	2	3	3	3	1	3	2	3	2	2	2	2	2	4	1	2	2	3	2	3	2	1	1	3	3		
13	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan.	ROO.22	103	6	6	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	4	1	4	1	3	2	2	2	2	2	5	1	2	1	4	4	4	4	4	2	1	3	3	
14	Peran / dukungan Kelembagaan Pengelola SDA masih kurang	ROO.22	103	6	6	3	3	2	3	3	2	3	2	3	3	2	2	2	1	3	2	2	2	2	2	3	2	2	1	2	3	2	3	1	1	3	4		
15	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakkan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan.	ROO.22	103	6	6	4	3	3	3	3	2	3	2	3	4	3	2	3	1	3	2	2	2	2	2	4	2	2	1	3	3	3	3	2	1	3	4		
16	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi AKNPI	ROO.22	103	6	6	4	3	3	3	3	2	3	2	3	4	4	1	4	2	3	2	2	2	2	2	4	1	3	2	4	4	4	4	4	2	1	4	4	
17	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.22	103	6	6	4	3	3	3	3	2	3	2	3	4	4	2	4	3	3	2	2	2	2	2	4	4	2	1	4	2	4	2	1	3	3	4		
18	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan krusakkan	ROO.22	103	6	6	4	3	3	3	3	2	3	2	3	4	5	1	5	2	3	2	2	3	2	2	3	4	2	1	5	3	5	3	1	2	3	4		
19	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	4	2	4		3	2	2	2	2	2	2	4	2	4	4	2	4	2	4	2	1	1	4	3
20	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	3	2	3	2	3	3	2	1	2	1	3	2	2	2	2	2	2	4	2	1	2	4	2	4	2	4	2	1	3	3







No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko				Skala Kemungkinan *)																															
						R3 3	R3 4	R3 5	R3 6	R3 7	R3 8	R3 9	R4 0	R4 1	R4 2	R4 3	R4 4	R4 5	R4 6	R4 7	R4 8	R4 9	R5 0	R5 1	R5 2	R5 3	R5 4	R5 5	R5 6	R5 7	R5 8	R5 9	R6 0	R6 1	R6 2	R6 3	R6 4
a	b	c				d																															
3	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Jalan akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan)	ROO.22	103	6	6	3	3	3	2	1	3	2	2	1	2	2	1	1	3	4	1	4	2	2	1	2	1	2	1	1	2	1	2	4	3	2	2
4	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.22	103	6	6		3	3	2	1	3	2	2	1	2	3	1	1	3	4	1	4	2	2	1	1	1	2	1	1	2	1	2	4	3	3	2
5	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan	ROO.22	103	6	6	3	3	3	2	2	2	2	1	1	2	2	1	1	3	4	2	4	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	5	3	3	3
6	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	ROO.22	103	6	6	4	3	3	2	2	3	2	1	1	2	3	1	1	3	5	1	4	3	2	1	5	1	2	1	1	3	1	2	4	3	3	3
7	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	3	4	2	1	2	4		2	1	4	5	1	5	3	2	1	5	3	3	2	1	3	1	1	4	4	3	2
8	Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi kurang optimal	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	3	4	2	1	2	3	3	1	1	4	4	2	4	2	2	1	3	2	2	1	2	3	2	2	5	4	3	2
9	Terdapat dokumen Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang gagal terbit	ROO.22	103	6	6	2	3	2	2	2	3	2	1	1	2	2	1	1	3	4	1	3	2	2	1	1	2	2	1	1	3	1	1	5	3	2	3
10	Belum seluruhnya Badan Usaha Jasa Konstruksi yang di Kabupaten Banyumas terawasi	ROO.22	103	6	6	3	3	3	2	2	3	1	1	1	3	4	1	1	5	5	1	4	3	2	1	1	2	2	1	1	2	1	2	4	5	3	3

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko		Skala Kemungkinan *)																																	
				R3 3	R3 4	R3 5	R3 6	R3 7	R3 8	R3 9	R4 0	R4 1	R4 2	R4 3	R4 4	R4 5	R4 6	R4 7	R4 8	R4 9	R5 0	R5 1	R5 2	R5 3	R5 4	R5 5	R5 6	R5 7	R5 8	R5 9	R6 0	R6 1	R6 2	R6 3	R6 4		
a	b	c				d																															
11	Kurang optimalnya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	ROO.22	103	6	6	3	3	3	4	2	3	2	1	1	2	3	1	1	1	4	2	4	3	2	1	4	2	2	1	2	3	2	1	4	1	3	2
12	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	3	2	2	2	1	4	2	1	1	1	4	1	4	3	2	1	2	2		1	1	4	1	1	3	1	2	2
13	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan.	ROO.22	103	6	6	3	3	3	1	4	3	2	2	1	4	3	1	2	3	5	2	5	2	2	2	4	2	3	1	2	2	2	2	4	3	2	3
14	Peran / dukungan Kelembagaan Pengelola SDA masih kurang	ROO.22	103	6	6	3	3	3	3	4	3	2	2	1	3	1	1	2	2	4	1	3	3	2	2	1	2	3	1	1	3	1	2	4	2	3	2
15	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakkan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan.	ROO.22	103	6	6	4	3	4	4	3	4	3	2	2	4	2	1	4	3	5	2	4	3	2	4	2	2	3	2	2	4	2	2	3	3	2	2
16	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi AKNPI	ROO.22	103	6	6	4	3	4	2	2	2	3	2	2	4	4	1	2	3	4	2	4	2	2	2	5	2	3	2	2	4	2	3	4	3	2	2
17	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.22	103	6	6	4	3	4	4	3	4	3	2	2	4	2	2	3	3	5	2	4	3	2	3	5	2	3	1	2	4	2	3	3	3	3	4
18	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan krusakkan	ROO.22	103	6	6	3	3	4	4	2	4	3	2	2	4	3	2	3	2	4	2	4	3	2	3	4	2	2	1	2	5	2	4	3	2	3	4
19	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan	ROO.22	103	6	6	3	3	3	4	3	4	3	1	2	4	2	1	1	2	5	1	5	3	2	1	5	2	2	2	1	5	2	1	4	2	2	5
20	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.22	103	6	6	3	2	3	4	4	4	3	1	2	5	1	1	1	2	4	2	4	2	2	1	3	2	2	1	2	2	2	1	3	2	2	5



Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
Tahun Penilaian : 2022  
Tujuan Strategis : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum  
Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko																																			
			R6 5	R6 6	R6 7	R6 8	R6 9	R7 0	R7 1	R7 2	R7 3	R7 4	R7 5	R7 6	R7 7	R7 8	R7 9	R8 0	R8 1	R8 2	R8 3	R8 4	R8 5	R8 6	R8 7	R8 8	R8 9	R9 0	R9 1	R9 2	R9 3	R9 4	R9 5	R9 6			
a	b	c																																			
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>																																				
1	Adanya resiko meningkatnya kerusakan infrastruktur irigasi	RSO.22	6	6	3	1	2	2	3	1	3	3	3	5	3	5	3	3	2	1	3	4	5	2	2	3	3	3	4	2	3	3	2	2	1	2	
2	Terdapat wilayah potensi rawan longsor	RSO.22	6	6	4	3	3	1	4	4	4	3	3	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	5	4	3	2	4	3	3	4	1	5	
3	Meningkatnya kerusakan jaringan drainase	RSO.22	6	6	3	1	2	1	3	1	3	3	3	5	3	5	4	3	3	3	3	3	3	1	3	3	3	4	1	3	3	3	2	1	2		
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.22	6	6	3	1	2	1	3	1	2	2	3	3	3	4	1	2	3	4	3	4	2	3	3	2	3	4	3	2	4	1	3	1	1	2	
5	Bertambahnya kerusakan Gedung Pemerintahan Daerah	RSO.22	6	6	3	1	2	1	3	2	3	2	3	1	3	4	2	2	2	1	2	3	2	2	2	2	3	2	5	1	3	3	2	2	1	2	
6	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik	RSO.22	6	6	3	1	2	1	3	1	3	3	3	2	3	3	3	2	3	1		3	3	3	2	2	3	3	4	1	3	3	3	1	1	3	
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>																																				
1	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	ROO.22	103	6	6	1	3	3	1	3	1	2	2	3	4	1	1	3	2	3	1	2	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	4	3	2	5	3
2	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Infrastruktur SDA	ROO.22	103	6	6	2	4	4	1	1	2	2	3	3	2	2	2	4	3	3	2	2	3	3	4	4	2	3	3	3	3	4	3	2	5	4	

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko																																			
					R6 5	R6 6	R6 7	R6 8	R6 9	R7 0	R7 1	R7 2	R7 3	R7 4	R7 5	R7 6	R7 7	R7 8	R7 9	R8 0	R8 1	R8 2	R8 3	R8 4	R8 5	R8 6	R8 7	R8 8	R8 9	R9 0	R9 1	R9 2	R9 3	R9 4	R9 5	R9 6	
a	b	c																																			
3	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Jalan akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan)	ROO.22	103	6	6	1	2	4	1	1	1	2	4	4	2	1		2	3	3	1	2	3	3	3	3	4	2	2	3	4	3	4	3	2	5	2
4	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.22	103	6	6	1	2	3	1	2	1	2	3	3	2	1	3	2	1	3	1	2	3	3	3	4	3	2	2	3	3	3	4	3	2	5	2
5	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan	ROO.22	103	6	6	2	3	4	1	3	2	2	3	3	2	2	4	2	1	3	2	2	3	3	3	3	4	2	2	3	4	3	4	3	2	4	3
6	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	ROO.22	103	6	6	1	4	4	2	4	1	2	4	3	4	1	4	4	4	3	1	1	3	3	3	3	5	2	3	3	3	3	4	3	3	5	4
7	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil	ROO.22	103	6	6	1	4	5	2	3	1	3	5		4	1	4	4	3	3	1	1	3	3	3	4	5	4	3	3	5	3	4	3	3	4	4
8	Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi kurang optimal	ROO.22	103	6	6	2	3	4	1	1	2	3	4	3	4	2	4	3	1	3	2	1	3	3	3	3	5	2	3	3	4	3	4	3	2	4	3
9	Terdapat dokumen Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang gagal terbit	ROO.22	103	6	6	1	2	3	1	3	1	3	2	3	4	1	2	2	4	3	1	1	3	3	3	2	4	2	2	3	4	3	4	3	1	5	2
10	Belum seluruhnya Badan Usaha Jasa Konstruksi yang di Kabupaten Banyumas terawasi	ROO.22	103	6	6	1	2	4	1	3	1	3	3	3	4	1	2	2	3	3	1	1	3	3	3	3	5	2	3	3	4	3	4	3	2	5	2

No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko																																					
						R6 5	R6 6	R6 7	R6 8	R6 9	R7 0	R7 1	R7 2	R7 3	R7 4	R7 5	R7 6	R7 7	R7 8	R7 9	R8 0	R8 1	R8 2	R8 3	R8 4	R8 5	R8 6	R8 7	R8 8	R8 9	R9 0	R9 1	R9 2	R9 3	R9 4	R9 5	R9 6		
a	b	c																																					
11	Kurang optimalnya Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG	ROO.22	103	6	6	2	3	4	1	2	2	3	4	2	2	2	3	3	2	3	2	2	3	3	3	4	4	2	2	3	4	3	4	3	2	5	3		
12	Terhambatnya pelaksanaan Pembangunan Embung dan Penampung Air Lainnya karena tidak tersedia lahan	ROO.22	103	6	6	1	4	3	1	3	1	3	3	2	4	1	3	4	5	3	1	2	3	3	3	4	5	2	4	3	4	3	4	3	2	5	4		
13	Terhambatnya Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing akibat Cuaca ekstrem, lokasi hasil survey tidak sesuai usulan, tumpang tindih kewenangan.	ROO.22	103	6	6	2	2	4	1	4	2	3	4	3	4	2	2	2	1	3	2	2	3	3	3	3	5	2	4	3	3	3	3	4	3	2	5	2	
14	Peran / dukungan Kelembagaan Pengelola SDA masih kurang	ROO.22	103	6	6	1	2	4	1	2	1	3	4	3	3	1	4	2	1	3	1	2	3	3	3	3	2	2	3	3	4	3	4	3	3	4	2		
15	Kurang optimalnya Rehabilitasi Jaringan Irigasi akibat Kerusakkan jaringan tinggi, prioritas anggaran, SDM yang belum sesuai kebutuhan.	ROO.22	103	6	6	2	4	4	1	3	2	3	3	3	4	2	3	4	2	3	2	2	3	3	3	2	2	2	3	3	4	3	4	3	2	5	4		
16	Operasi dan Pemeliharaan Irigasi kurang maksimal karena belum memenuhi AKNPI	ROO.22	103	6	6	2	4	4	1	4	2	3	4	3	4	2	2	4	4	3	2	2	3	3	3	3	4	2	3	3	4	3	4	3	3	5	4		
17	Pembangunan, Peningkatan dan Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan masih belum mampu mengurangi luas genangan	ROO.22	103	6	6	2	4	5	2	4	2	3	4	3	4	2	4	4	5	3	2	2	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	5	4
18	kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase belum mencukupi kebutuhan penanganan kerusakkan	ROO.22	103	6	6	2	4	4	2	5	2	3	4	3	4	2	3	4	5	3	2	2	3	3	3	3	5	3	3	3	4	3	4	3	4	3	4	5	4
19	Terbatasnya ketersediaan lahan untuk pembangunan/peningkatan jalan	ROO.22	103	6	6	1	3	5	1	4	1	3	3	3	3	1	2	3	4	3	1	2	3	3	3	3	4	4	5	3	4	3	4	3	2	5	3		
20	Kurangnya Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan	ROO.22	103	6	6	2	4	4	1	2	2	3	4	3	4	2	3	4	4	3	2	2	3	3	3	4	4	2	3	3	3	3	3	3	3	1	5	4	



				Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Penilaian : 2022 Tujuan Strategis : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar																										
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko																					Skor Skala Rata Rata							
			R9 7	R9 8	R9 9	R1 00	R1 01	R1 02	R1 03	R1 04	R1 05	R1 06	R1 07	R1 08	R1 09	R1 10	R1 11	R1 12	R1 13	R1 14	R1 15	R1 16		R1 17	R1 18	R1 19	R1 20			
a	b	c																					e							
<b>I</b>	<b>Risiko Strategis OPD</b>																													
1	Adanya resiko meningkatnya merusakkan infrastruktur irigasi	RSO.22		6	6	3	1	3	3	3	3	3	2	3	3	1	3	3	3	3	2	3	4	3	3	3	3	2,94		
2	Terdapat wilayah potensi rawan longsor	RSO.22		6	6	3	2	5	3	4	5	5	4	3	4	3	1	5	3	3	5	5	3	4	4	3	2	3	4	3,66
3	Meningkatnya merusakkan jaringan drainase	RSO.22		6	6	3	2	3	3	4	3	3	4	2	4	3	1	3	3	3	3	3	2	4	4	3	3	3	4	3,11
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.22		6	6	2	2	3	1	4	3	4	1	1	2	1	2	3	1	3	3	3	1	5	4	2	2	3	3	2,71
5	Bertambahnya merusakkan Gedung Pemerintahan Daerah	RSO.22		6	6	2	2	3	3	2	3	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	3	2	3	3	2,53	
6	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik	RSO.22		6	6	2	2	3	3	4	3	4	3	1	2	3	2	3	3	3	3	3	3	4	4	3	2	3	3	2,79
<b>II</b>	<b>Risiko Operasional OPD</b>																													
1	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi	ROO.22	103	6	6	2	2	1	2	2	1	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	2	4	2	3	2	2,29
2	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup dalam pengelolaan Infrastruktur SDA	ROO.22	103	6	6	2	2	2	2	1	1	2	3	3	3	2	4	3	3	2	2	2	3	2	2	3	3	4	2	2,39



No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko				R1-R9																				Skor Skala Rata Rata				
						R9 7	R9 8	R9 9	R1 00	R1 01	R1 02	R1 03	R1 04	R1 05	R1 06	R1 07	R1 08	R1 09	R1 10	R1 11	R1 12	R1 13	R1 14	R1 15	R1 16		R1 17	R1 18	R1 19	R1 20
a	b	c																								e				
3	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Jalan akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan)	ROO.22	103	6	6	2	2	2	3	2	1	2	2	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	3	3	2	1	2	2,26
4	Terhambatnya pelaksanaan pekerjaan Fisik Bangunan Gedung akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan (Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Serta Perencanaan Teknis)	ROO.22	103	6	6	2	2	2	4	2	1	2	4	3	3	2	2	3	3	2	2	1	3	2	4	2	4	2	2	2,32
5	Terhambatnya pelaksanaan kegiatan tata bangunan dan lingkungannya akibat kesalahan dalam tahapan perencanaan	ROO.22	103	6	6	2	2	2	4	1	1	2	3	3	3	2	3	3	3	2	2	2	3	2	2	2	3	3	2	2,42
6	Belum tercukupinya kebutuhan Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	ROO.22	103	6	6	3	2	2	2	1	1	3	2	3	3	3	3	4	3	2	2	1	3	3	2	3	2	3	3	2,56
7	Kurangnya jumlah peserta dalam pelatihan tenaga terampil	ROO.22	103	6	6	3	3	2	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	3	3	4	4	3	3	2,80
8	Pengelolaan Sistem Informasi Jasa Konstruksi kurang optimal	ROO.22	103	6	6	2	3	2	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	3	3	2	2	3	2	3	4	4	3	2	2,56
9	Terdapat dokumen Rekomendasi Teknis IUJK Nasional yang gagal terbit	ROO.22	103	6	6	1	1	2	2	2	1	1	4	3	2	1	3	3	3	2	2	1	2	1	2	2	4	3	1	2,23
10	Belum seluruhnya Badan Usaha Jasa Konstruksi yang di Kabupaten Banyumas terawasi	ROO.22	103	6	6	2	3	2	2	2	3	2	4	3	3	2	4	3	3	1	2	2	3	2	2	3	4	4	2	2,53







**FORMULIR KERTAS KERJA  
DAFTAR RISIKO PRIORITAS**

No	"Risiko yang Teridentifikasi"	Kode Risiko				Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
1	Bertambahnya kerusakan Gedung Pemerintahan Daerah	RSO.22		6	6	6,25	DPU	Kurangnya pemeliharaan Gedung karena anggaran yang terbatas, dan belum dianggap sebagai prioritas::Umur Konstruksi; Gagal konstruksi; Tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran;	pelayanan publik, di gedung-gedung pemerintah tidak maksimal
2	Adanya resiko meningkatnya kerusakan infrastruktur irigasi	RSO.22		6	6	8,7	DPU	Kegagalan konstruksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Fisik Infrastruktur Irigasi::Kurangnya pemeliharaan Irigasi karena anggaran yang terbatas, dan belum dianggap sebagai prioritas	pelayanan air irigasi tidak maksimal
3	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik	RSO.22		6	6	7,56	DPU	Kegagalan konstruksi dalam pelaksanaan Pekerjaan Fisik Infrastruktur Jalan::Kurangnya pemeliharaan Jalan karena anggaran yang terbatas, dan belum menjadi prioritas	Menurunnya tingkat kondisi baik jalan, sehingga Pemanfaatan fungsi jalan tidak maksimal
4	Terdapat Penyedia Jasa Konstruksi yang kurang mendapat pembinaan	RSO.22		6	6	6,75	DPU	Penyedia jasa tidak menghadiri acara pembinaan	Penyedia Jasa konstruksi tidak memperoleh pembinaan
5	Meningkatnya kerusakan jaringan drainase	RSO.22		6	6	9,3	DPU	1. Curah hujan ekstrim sehingga kapasitas drainase tidak mencukupi 2. Kurangnya pemeliharaan Drainase karena anggaran yang terbatas, dan belum dianggap sebagai prioritas 3. Umur Konstruksi; Gagal konstruksi; Tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran.	Meningkatnya luas genangan
6	Terdapat wilayah potensi rawan longsor	RSO.22		6	6	14,06	DPU	1. Belum seluruh titik rawan longsor diamankan (Bangunan pengaman); Umur konstruksi; gagal konstruksi; tidak masuk prioritas/tidak tersedia anggaran. 2. Cuaca ekstrim; Kondisi geografis; 3. Kurangnya pemeliharaan bangunan pengaman karena anggaran yang terbatas, dan belum dianggap sebagai prioritas	Wilayah / titik potensi rawan longsor meningkat

## FORMULIR KERTAS KERJA

Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Lingkungan Pengendalian

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Banyumas							
Tahun Penilaian : 2022							
NO	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Uraian Pengendalian yang Ada	Efektifitas	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h
<b>G</b>	<b>PERWUJUDAN PERAN APIP YANG EFEKTIF</b>						
	Surat Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700/141.OP/27/IRB/2020 Tanggal 19 Maret 2020.	Surat Inspektur Kabupaten Banyumas Nomor 700/141.OP/27/IRB/2020 Tanggal 19 Maret 2020.	KE		1 Melaksanakan hal-hal yang sudah direncanakan pada dokumen RTP	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2022
	Surat Bupati Banyumas Atas tindak lanjut LHP LKPD TA BPK RI Tahun 2019 Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (LHP Nomor 99A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020, Nomor 99B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020, Nomor 99C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020	Surat Bupati Banyumas Atas tindak lanjut LHP LKPD TA BPK RI Tahun 2019 Perwakilan Provinsi Jawa Tengah (LHP Nomor 99A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020, Nomor 99B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020, Nomor 99C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2020	E		1 Penguatan SDM Satgas SPIP	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2022

**Formulir Kertas Kerja**  
**Penilaian atas Kegiatan Pengendalian yang Ada dan Masih Dibutuhkan untuk Mengatasi Risiko**

<b>Nama Pemda</b>	: Pemerintah Kabupaten Banyumas
<b>Tahun Penilaian</b>	: 2022
<b>Tujuan Strategis</b>	: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum
<b>Urusan Pemerintahan</b>	: Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian yang Sudah Ada *)	E/KE/TE	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ Penanggung Jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e	f	g	h	i
	<b>Strategis OPD</b>							
1	Terdapat wilayah potensi rawan longsor		Optimalisasi database rawan bencana, prioritas penanganan, Pembentukan Satgas TRC, Penanganan darurat	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Optimalisasi Prioritas penanganan, mengefektifkan TRC, UPTD Teknis	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2022
2	Meningkatnya kerusakan jaringan drainase		Optimalisasi database kerusakan, prioritas penanganan, Koordinasi lintas bidang terakit	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Pembuatan data genangan, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2022
3	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik		Review SK Jalan Kabupaten, Optimalisasi database kerusakan Jalan, prioritas penanganan	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Update data Jalan Kabupaten, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2022
4	Bertambahnya kerusakan Gedung Pemerintahan Daerah		Pembaharuan database kerusakan bangunan gedung pemerintah, prioritas penanganan	KE	Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas	Optimaliasasi penanganan, usulan penambahan anggaran, mencari sumber pendanaan di Provinsi atau pusat	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2022

## RANCANGAN PENGKOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/ Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h
	<b>Strategis OPD</b>						
1	Optimalisasi penanganan, usulan penambahan anggaran, mencari sumber pendanaan di Provinsi atau pusat	Rapat/Surat/WAG	DPU, UPTD, BAPPEDALITBANG, BKAD.	DPU, UPTD DPU	Triwulan II 2022	Triwulan II 2022	Usulan anggaran Bangub dan DAK
2	Update data Jalan Kabupaten, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Rapat/Surat/WAG/Facebook/Instagram/Twitter/Lapak Aduan	DPU, UPTD DPU	DPU, UPTD DPU	Triwulan IV 2022	Triwulan IV 2022	TRC telah dioptimalkan
3	Pembuatan data genangan, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Rapat/Surat/WAG/Facebook/Instagram/Twitter/Lapak Aduan	DPU, UPTD DPU	DPU, UPTD DPU	Triwulan IV 2022	Triwulan IV 2022	TRC telah dioptimalkan
4	Optimalisasi Prioritas penanganan, mengefektifkan TRC, UPTD Teknis	Rapat/Surat/WAG/Facebook/Instagram/Twitter/Lapak Aduan	DPU, UPTD DPU	DPU, UPTD DPU	Triwulan IV 2022	Triwulan IV 2022	TRC telah dioptimalkan



### RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Tujuan Strategis : Meningkatnya ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pemantauan	Realisasi Waktu Pemantauan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
	<b>Strategis OPD</b>					
1	Optimalisasi penanganan, usulan penambahan anggaran, mencari sumber pendanaan di Provinsi atau pusat	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan baik elektronik/WAG ataupun tertulis	Kepala Bidang Penataan Bangunan	Triwulan IV 2022	Triwulan IV 2022	Sebagian Monitoring telah dilaksanakan
2	Update data Jalan Kabupaten, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan baik elektronik/WAG ataupun tertulis	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembangunan Jalan; Kepala Bidang Pemeliharaan dan Monev Jalan	Triwulan IV 2022	Triwulan IV 2022	Sebagian Monitoring telah dilaksanakan
3	Pembuatan data genangan, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan baik elektronik/WAG ataupun tertulis	Kepala Bidang Drainase dan Jasa Konstruksi	Triwulan IV 2022	Triwulan IV 2022	Sebagian Monitoring telah dilaksanakan
4	Optimalisasi Prioritas penanganan, mengefektifkan TRC, UPTD Teknis	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan baik elektronik/WAG ataupun tertulis	Kepala Dinas PU	Triwulan IV 2022	Triwulan IV 2022	Sebagian Monitoring telah dilaksanakan

## PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISK EVENT) DAN RTP

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Banyumas  
 Tahun Penilaian : 2022  
 Tujuan Strategis : Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur Pekerjaan Umum di Dinas Pekerjaan Umum  
 Urusan Pemerintahan : Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	<b>Strategis OPD</b>									
1	Bertambahnya kerusakan Gedung Pemerintahan Daerah	RSO.21..06.06	01/01/2022	Anggaran pemeliharaan gedung pemerintah sangat kurang	Tingkat kerusakan gedung pemerintah meningkat	-	Optimalisasi penanganan, usulan penambahan anggaran, mencari sumber pendanaan di Provinsi atau pusat	Triwulan IV 2022	Triwulan 1, 2, 3, 4	-
2	Terdapat wilayah yang belum terkoneksi oleh jalan kondisi baik	RSO.21..06.06	01/01/2022	Kondisi infrastruktur jalan;	Mobilitas masyarakat terganggu	perhitungan wilayah berdasarkan wilayah desa	Update data Jalan Kabupaten, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Triwulan IV 2022	Triwulan 1, 2, 3, 4	Proses update data jalan bersamaan juga pembaharuan SK Jalan
3	Meningkatnya kerusakan jaringan drainase	RSO.21..06.06	01/01/2022	Cuaca; Umur Infrastruktur; pemanfaatan saluran drainase tidak sesuai rencana	Lama genangan dan potensi merusak jaringan jalan	terutama di wilayah perkotaan	Pembuatan data genangan, Optimalisasi Prioritas penanganan, UPTD Teknis	Triwulan IV 2022	Triwulan 1, 2, 3, 4	UPTD turut aktif dalam normalisasi saluran drainase
4	Terdapat wilayah potensi rawan longsor	RSO.21..06.06	01/01/2022	Cuaca; Kondisi geografis; Umur Infrastruktur	Banyak pemukiman dan infrastruktur terancam bencana longsor	Cuaca penghujan menyebabkan arus dan debit sungai cenderung meningkat dan menggerus tanggul dan tebing sungai	Penanganan aduan dalam waktu 24 Jam	sepanjang waktu		
							Optimalisasi Prioritas penanganan, mengefektifkan TRC, UPTD Teknis	Triwulan IV 2022	Triwulan 1, 2, 3, 4	TRC siaga 24 jam sepanjang tahun